

**DINAS KETAHANAN
PANGAN 2023**

DISKETAPANG@LOMBOKTENGAKAB.GO.ID



LAPORAN KEUANGAN

LRA,LO,NERACA,LPE,CALK

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

LRA
LO
NERACA
LPE
CALK



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

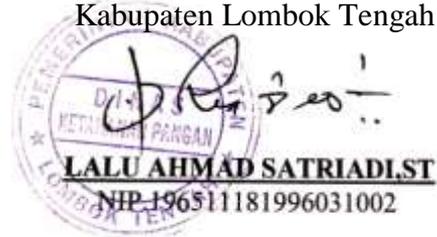
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya Laporan Keuangan Tahun 2023 Berbasis Akrual pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah



LALU AHMAD SATRIADIST
NIP. 196511181996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
I. FACE LAPORAN OPERASIONAL.....	v
II. FACE NERACA.....	vii
III. FACE LAPORAN OPERASIONAL.....	ix
IV. FACE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	x
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI	1
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	15
1. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	15
2. POS-POS NERACA	22
C. PENUTUP	30
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 126 Kec. Praya Kode Pos 83511

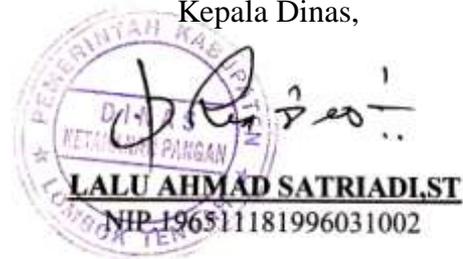
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas,


LALU AHMAD SATRIADI ST
NIP. 196511181996031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
LAPORAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH-LO	-	2.835.280,00	(2.835.280,00)	-100
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.835.280,00	(2.835.280,00)	-100
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0
Retribusi Daerah	-	-	-	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0
Lain-lain PAD yang Sah	-	2.835.280,00	(2.835.280,00)	-100
PENDAPATAN TRANSFER-LO	-	-	-	0
Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	0
Dana Perimbangan - LO	-	-	-	0
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	0
Transfer Antar Daerah - LO	-	-	-	0
Pendapatan Bagi Hasil - LO	-	-	-	0
Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	-	-	0
Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	0
Dana Darurat-LO	-	-	-	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0
BEBAN OPERASIONAL	3.049.059.033,00	7.032.932.300,00	(3.983.873.267,00)	-131
Beban Pegawai	2.323.613.465,00	2.252.438.428,00	71.175.037,00	3
Beban Barang dan Jasa	575.031.294,00	4.616.827.752,00	(4.041.796.458,00)	-703
Beban Bunga	-	-	-	0
Beban Hibah	-	-	-	0
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	150.414.274,00	163.666.120,00	(13.251.846,00)	0
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	0
Beban Transfer	-	-	-	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.049.059.033,00)	(7.030.097.020,00)	3.981.037.987,00	-131
KEGIATAN NON - OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-	0
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO	-	-	-	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	0
DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	0
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	0
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.049.059.033,00)	(7.030.097.020,00)	3.981.037.987,00	-131
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	0
Beban Luar Biasa	-	-	-	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.049.059.033,00)	(7.030.097.020,00)	3.981.037.987,00	-131

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. LOMBOK TENGAH**


LALU AHMAD SATRIADI
 NIP. 196511181996031002

LAPORAN OPERASIONAL RINCI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

1.949.996,00

AKUN AKRUAL	URAIAN	LRA RINCIAN OPD	DEBET	KREDIT	LO RINCI 2023
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
4	PENDAPATAN DAERAH	-			-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-			-
4.1.1.06	Pajak Hotel	-			-
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	-			-
4.1.1.06.01.0001	Pajak Hotel	-			-
4.1.1.06.03	Pajak Losmen	-			-
4.1.1.06.03.0001	Pajak Losmen	-			-
4.1.1.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07	Pajak Restoran	-			-
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.08	Pajak Hiburan	-			-
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-			-
4.1.1.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-			-
4.1.1.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	-			-
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-			-
4.1.1.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-			-
4.1.1.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-			-
4.1.1.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-			-
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	-			-
4.1.1.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	-			-
4.1.1.09	Pajak Reklame	-			-
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	-			-
4.1.1.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	-			-
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	-			-
4.1.1.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	-			-
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-			-
4.1.1.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-			-
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	-			-
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-			-
4.1.1.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-			-
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-			-
4.1.1.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-			-
4.1.1.11	Pajak Parkir	-			-
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	-			-
4.1.1.11.01.0001	Pajak Parkir	-			-
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	-			-
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	-			-
4.1.1.12.01.0001	Pajak Air Tanah	-			-
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	-			-
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	-			-
4.1.1.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	-			-
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-			-
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	-			-
4.1.1.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	-			-
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	-			-
4.1.1.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	-			-
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-			-
4.1.1.15.01	PBBP2	-			-
4.1.1.15.01.0001	PBBP2	-			-

4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-			-
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	-			-
4.1.1.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				-
4.1.2	Retribusi Daerah	-			-
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	-			-
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-			-
4.1.2.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				-
4.1.2.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				-
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-			-
4.1.2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				-
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-			-
4.1.2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				-
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	-			-
4.1.2.01.05.0001	Retribusi Pelataran				-
4.1.2.01.05.0002	Retribusi Los				-
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-			-
4.1.2.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				-
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	-			-
4.1.2.01.09.01	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus				-
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-			-
4.1.2.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya				-
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-			-
4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				-
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	-			-
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-			-
4.1.2.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				-
4.1.2.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				-
4.1.2.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				-
4.1.2.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				-
4.1.2.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				-
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-			-
4.1.2.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan				-
4.1.2.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				-
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	-			-
4.1.2.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan				-
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-			-
4.1.2.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				-
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	-			-
4.1.2.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				-
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-			-
4.1.2.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				-
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-			-
4.1.2.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				-
4.1.2.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				-
4.1.2.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Temak, dan Ikan				-
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	-			-
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-			-
4.1.2.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan				-
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	-			-
4.1.2.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				-
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-			-
4.1.2.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				-
4.1.2.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-			-
4.1.2.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing				-
4.1.02.03.07	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-			-
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-			-
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	-			-
4.1.3.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	-			-
4.1.3.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-			-
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-			-
4.1.4.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-			-
4.1.4.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung				-
4.1.4.05	Jasa Giro	-			-
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	-			-
4.1.4.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				-

4.1.4.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-			-
4.1.4.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS				-
	Remunerasi LO				
	Remunerasi Dana Transfer TDF				
	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF				
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	-			-
4.1.4.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-			-
4.1.4.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				-
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-			-
4.1.4.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-			-
4.1.4.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				-
4.1.4.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat	-			-
4.1.4.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				-
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-			-
4.1.4.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-			-
4.1.4.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				-
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-			-
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-			-
4.1.4.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				-
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-			-
4.1.4.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-			-
4.1.4.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				-
4.1.4.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	-			-
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-			-
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-			-
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-			-
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-			-
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	-			-
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-			-
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-			-
4.1.4.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-			-
4.1.4.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2				-
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-			-
4.1.4.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-			-
4.1.4.13.01.01	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				-
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-			-
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan				-
4.1.4.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-			-
4.1.4.13.03.01	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				-
4.1.4.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-			-
4.1.4.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-			-
4.1.4.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa				-
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	-			-
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-			-
4.1.4.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				-
4.1.4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-			-
4.1.4.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				-
4.1.4.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-			-
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa				-
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Nege	-			-
4.1.4.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	-			-
4.1.4.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK				-
4.1.04.15.05.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Ha	-			-
4.1.4.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-			-
4.1.04.15.16.00067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-			-
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-			-
4.1.04.15.16.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai HabisMakanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan				-
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Bembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				-
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	-			-
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	-			-
4.1.4.16.01.0001	Pendapatan BLUD				-
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tin	-			-
4.1.4.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-			-
4.1.4.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-			-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-			-
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-			-
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				-

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-			-
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-			-
4.2.1.01	Dana Perimbangan	-			-
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-			-
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				-
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21				-
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN				-
4.2.1.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				-
4.2.1.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				-
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				-
4.2.1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				-
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				-
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-			-
4.2.1.01.02.0001	DAU				-
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-			-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				-
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				-
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				-
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya				-
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				-
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler				-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				-
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup				-
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi				-
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				-
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting				-
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				-
4.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan				-
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan				-
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-			-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja				-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD				-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				-
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				-
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata				-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				-
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB				-
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian				-
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM				-
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK				-
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-			-
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-			-
4.2.1.02.01	DID	-			-
4.2.1.02.01.0001	DID				-
4.2.1.05	Dana Desa	-			-
4.2.1.05.01	Dana Desa	-			-

4.2.1.05.01.0001	Dana Desa				-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-			-
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	-			-
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-			-
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				-
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				-
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				-
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				-
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-			-
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-			-
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-			-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-			-
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-			-
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-			-
4.3.1.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				-
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-			-
4.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-			-
4.3.1.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-			-
4.3.1.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-			-
4.3.1.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-			-
4.3.1.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-			-
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	-			-
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-			-
4.3.3.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS				-
4.3.3.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-			-
4.3.3.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia				-
4.3.3.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-			-
4.3.3.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD				-
		-			-
	JUMLAH PENDAPATAN	-			-
		-			-
		-			-
5	Beban DAERAH				
5.1	Beban OPERASI	2.901.663.244,00			3.049.059.033,00
5.1.1	Beban Pegawai	2.325.563.461,00	6.426.978,00		2.323.613.465,00
5.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.254.247,00	6.426.978,00		1.513.681.225,00
5.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.157.126.498,00	6.024.000,00		1.163.150.498,00
5.1.1.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.157.126.498,00	6.024.000,00		1.163.150.498,00
5.1.1.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK				-
5.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	120.298.233,00	402.387,00		120.700.620,00
5.1.1.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	120.298.233,00	402.387,00		120.700.620,00
5.1.1.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK				-
5.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	120.610.000,00			120.610.000,00
5.1.1.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	120.610.000,00			120.610.000,00
5.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	-			-
5.1.1.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS				-
5.1.1.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK				-
5.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.160.000,00			31.160.000,00
5.1.1.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.160.000,00			31.160.000,00
5.1.1.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK				-
5.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	70.609.500,00			70.609.500,00
5.1.1.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	70.609.500,00			70.609.500,00
5.1.1.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK				-
5.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.432.306,00			7.432.306,00
5.1.1.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.432.306,00			7.432.306,00
5.1.1.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-			-
5.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.710,00	591,00		18.301,00
5.1.1.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.710,00	591,00		18.301,00
5.1.1.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK				-
5.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-			-
5.1.1.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS				-

5.1.1.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				-
5.1.1.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	-			-
5.1.1.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				-
5.1.1.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				-
5.1.1.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	-			-
5.1.1.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS				-
5.1.1.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK				-
5.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	815.075.214,00			806.698.240,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	815.075.214,00			806.698.240,00
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	815.075.214,00	57.207.038,00	65.584.012,00	806.698.240,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.234.000,00			3.234.000,00
5.1.1.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-			-
5.1.1.03.01.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-			-
5.1.1.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel				-
5.1.1.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				-
5.1.1.03.01.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan				-
5.1.1.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame				-
5.1.1.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				-
5.1.1.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir				-
5.1.1.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah				-
5.1.1.03.01.0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				-
5.1.1.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				-
5.1.1.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan				-
5.1.1.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-
5.1.1.03.02	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-			-
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				-
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan				-
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				-
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar				-
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				-
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang				-
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				-
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				-
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				-
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan				-
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan				-
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga				-
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah				-
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan				-
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				-
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				-
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				-
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung				-
5.1.1.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-			-
5.1.1.03.03.0001	Beban TPG PNSD				-
5.1.1.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-			-
5.1.1.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD				-
5.1.1.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-			-
5.1.1.03.06.0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				-
5.1.1.03.07	Beban Honorarium	3.234.000,00			3.234.000,00
5.1.1.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000,00			3.234.000,00
5.1.1.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				-
5.1.1.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				-
5.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-			-
5.1.1.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	-			-
5.1.1.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD				-
5.1.1.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	-			-
5.1.1.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD				-
5.1.1.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	-			-
5.1.1.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD				-
5.1.1.04.04	Beban Uang Paket DPRD	-			-
5.1.1.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD				-
5.1.1.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	-			-
5.1.1.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD				-
5.1.1.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-			-
5.1.1.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				-
5.1.1.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	-			-

5.1.1.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				-
5.1.1.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD		-		-
5.1.1.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD				-
5.1.1.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		-		-
5.1.1.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				-
5.1.1.04.11	Beban Pembulatan Gaji DPRD		-		-
5.1.1.04.11.0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD		-		-
5.1.1.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD		-		-
5.1.1.04.12.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD				-
5.1.1.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD				-
5.1.1.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD				-
5.1.1.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD		-		-
5.1.1.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD				-
5.1.1.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD		-		-
5.1.1.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD				-
5.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH				-
5.1.1.05.02	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH				-
5.1.1.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH				-
5.1.1.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH				-
5.1.1.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH				-
5.1.1.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH		-		-
5.1.1.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH				-
5.1.1.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-		-
5.1.1.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD		-		-
5.1.1.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD				-
5.1.1.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH		-		-
5.1.1.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH				-
5.1.1.88	Beban Pegawai BOS		-		-
5.1.1.88.88	Beban Pegawai BOS		-		-
5.1.1.88.88.8888	Beban Pegawai BOS				-
5.1.1.99	Beban Pegawai BLUD		-		-
5.1.1.99.99	Beban Pegawai BLUD		-		-
5.1.1.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD				-
			-		-
5.1.2	Beban Barang dan Jasa		576.099.783,00		575.031.294,00
5.1.2.01	Beban Barang/Persediaan		249.104.550,00		249.202.550,00
5.1.2.01.01	Beban Barang Pakai Habis		249.104.550,00		249.202.550,00
5.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1.420.000,00		1.420.000,00
5.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia				-
5.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		67.503.950,00		67.503.950,00
5.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku				-
5.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				-
5.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas				-
5.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				-
5.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		210.000,00		210.000,00
5.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				-
5.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar				-
5.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				-
5.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium				-
5.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				-
5.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				-
5.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				-
5.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		22.660.600,00	590.000,00	492.000,00
5.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				-
5.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.661.500,00		4.661.500,00
5.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.740.000,00		1.740.000,00
5.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.840.500,00		5.840.500,00
5.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		685.500,00		685.500,00
5.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		329.500,00		329.500,00
5.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		1.800.000,00		1.800.000,00
5.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				-

5.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				-
5.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				-
5.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat				-
5.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				-
5.1.02.01.01.0039	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	81.458.000,00			81.458.000,00
5.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	22.675.000,00			22.675.000,00
5.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan				-
5.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.120.000,00			38.120.000,00
5.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				-
5.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh				-
5.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				-
5.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH				-
5.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				-
5.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				-
5.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)				-
5.1.02.01.01.0067	Beban Pakaian Penyelamatan				-
5.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja				-
5.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium				-
5.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah				-
5.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional				-
5.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga				-
5.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka				-
5.1.2.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	-			-
5.1.2.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)				-
5.1.2.01.02.0013	Beban pipa pipa lainnya				-
5.1.2.02	Beban Jasa	214.986.491,00			213.820.002,00
5.1.2.02.01	Beban Jasa Kantor	211.774.491,00			210.608.002,00
5.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00			1.200.000,00
5.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000,00			600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00			33.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				-
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian				-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				-
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				-
5.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan				-
5.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan				-
5.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	8.950.600,00			8.950.600,00
5.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				-
5.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				-
5.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				-
5.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan				-
5.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				-
5.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	104.200.000,00			104.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.907.200,00			24.907.200,00
5.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli				-
5.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan				-
5.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan				-
5.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka				-
5.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir				-
5.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO				-
5.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				-
5.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias				-
5.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				-
5.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik				-
5.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				-
5.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara				-
5.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi				-
5.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi				-
5.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah				-
5.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				-
5.1.02.02.01.0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah				-
5.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				-
5.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon				-
5.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	4.164.905,00	385.326,00	401.092,00	4.149.139,00

5.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	17.872.360,00	1.684.335,00	2.835.058,00	16.721.637,00
5.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00			960.000,00
5.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.706.740,00	637.420,00	637.420,00	7.706.740,00
5.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	2.100.000,00			2.100.000,00
5.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya				-
5.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan				-
5.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.112.686,00			6.112.686,00
5.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up				-
5.1.2.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00			1.212.000,00
5.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				-
5.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI				-
5.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3				-
5.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3				-
5.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				-
5.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	535.098,00			535.098,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	676.902,00			676.902,00
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	-			-
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal				-
5.1.02.02.03.0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan				-
5.1.2.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-			-
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator				-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				-
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya				-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				-
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				-
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film				-
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya				-
5.1.2.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-			-
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				-
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga				-
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka				-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				-
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				-
5.1.2.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-			-
5.1.2.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya				-
5.1.2.02.08	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-			-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural				-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur				-
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta				-
5.1.2.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-			-
5.1.2.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaa				-
5.1.2.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				-
5.1.2.02.09.0017	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata				-
5.1.2.02.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-			-
5.1.2.02.11.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1				-
5.1.2.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00			2.000.000,00
5.1.2.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan				-
5.1.2.02.12.0002	Beban Sosialisasi	2.000.000,00			2.000.000,00
5.1.2.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis				-
5.1.2.03	Beban Pemeliharaan	14.000.000,00			14.000.000,00
5.1.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-			-
5.1.2.03.01.0016	Belanja Pemeliharaan Tanah				-
5.1.2.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00			14.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator				-
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment				-
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat				-
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya				-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Berm	14.000.000,00			14.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus				-
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				-
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor				-
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah				-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				-

5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				-
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio				-
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				-
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan				-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				-
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				-
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				-
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman				-
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar				-
5.1.2.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-			-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				-
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				-
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				-
5.1.2.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-			-
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten				-
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				-
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				-
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya				-
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya				-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	98.008.742,00			98.008.742,00
5.1.2.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.008.742,00	-	-	98.008.742,00
5.1.2.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	56.858.742,00			56.858.742,00
5.1.2.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.150.000,00			41.150.000,00
5.1.2.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Daerah				
5.1.2.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-			-
5.1.2.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-			-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				-
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi				-
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				-
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian				-
5.1.2.88	Beban Barang dan Jasa BOS	-			-
5.1.2.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	-			-
5.1.2.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	-			-
5.1.2.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-			-
5.1.2.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-			-
5.1.2.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	-			-
5.1.3	Beban Bunga	-			-
5.1.3.01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-			-
5.1.3.01.02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam	-			-
5.1.3.01.02.0001	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	-			-
5.1.5	Beban Hibah	-			-
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-			-
5.1.005.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-			-
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-			-
5.1.5.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	-			-
5.1.5.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yan	-			-
5.1.5.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-			-
5.1.5.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Mem	-			-
5.1.5.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-			-
5.1.5.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-			-
5.1.5.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-			-
5.1.5.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-			-
5.1.5.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Ke	-			-
5.1.5.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-			-
5.1.5.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-			-
5.1.5.07.01.0001	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-			-
5.1.6	Beban Bantuan Sosial	-			-
5.1.6.02	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-			-
5.1.6.02.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	-			-
5.1.6.02.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	-			-
5.1.6.03	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-			-
5.1.6.03.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-			-
5.1.6.03.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-			-
	Beban Penyisihan	-			-
	Beban Penyisihan	-			-
	Beban Penyisihan Piutang	-			-

	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan				-
	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-			-
	Beban Penyisihan Piutang TGR	-			-
	Beban Lain-lain	-			-
	Beban Lain-lain	-			-
	Beban Lain-lain	-			-
	Beban Lain-lain	-			-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-			150.414.274,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-			100.493.800,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-			100.493.800,00
	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat		100.493.800,00		100.493.800,00
	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	-			-
	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	-			-
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-			-
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-			-
	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	-			-
	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-			-
	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	-			-
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	-			-
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	-			-
	Beban Penyusutan Alat Ukur	-			-
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	-			-
	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-			-
	Beban Penyusutan Alat Kantor	-			-
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	-			-
	Beban Penyusutan Komputer	-			-
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-			-
	Beban Penyusutan Alat Studio	-			-
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	-			-
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	-			-
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	-			-
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	-			-
	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	-			-
	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-			-
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-			-
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-			-
	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-			-
	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BA	-			-
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-			-
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-			-
	Beban Penyusutan Senjata Api	-			-
	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	-			-
	Beban Penyusutan Amunisi	-			-
	Beban Penyusutan Senjata Sinar	-			-
	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	-			-
	Beban Penyusutan Alat alat Pertanian	-			-
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-			49.920.474,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-			49.920.474,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja		49.920.474,00		49.920.474,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Candi	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan wisata rekreasi	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Ruang Tunggu Pasien	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Space Iklan/Billboard	-			-
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	-			-
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	-			-
	Beban Penyusutan Jalan	-			-
	Beban Penyusutan Jembatan	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	-			-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	-			-

	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	-		-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-		-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-		-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku			
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	-		-
	Beban Penyusutan Bangunan Air	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih			
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Gas	-		-
	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	-		-
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	-		-
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik			
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	-		-
	Beban Penyusutan Jaringan Gas	-		-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-		-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-		-
	Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	-		-
	Beban Penyusutan Aset Kemitraan gedung dan bangunan			
	Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	-		-
	Beban Transfer	-		-
	Beban Bagi Hasil	-		-
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-		-
5.4.1.01.03.0001	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			
	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-		-
5.4.1.02.01.0001	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa			
	Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-		-
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada pemerintahan kabupaten	-		-
	Beban Transfer Bantuan Keuangan	-		-
	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-		-
5.4.2.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-		-
5.4.2.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
	Beban Transfer Bantuan Keuangan	-		-
	Beban Transfer kepada Partai Politik...	-		-
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-		-
	Beban Tak Terduga	-		-
	Beban Tak Terduga	-		-
	Beban Tak Terduga	-		-
		-		-
		-		-
	JUMLAH BEBAN	2.901.663.244,00		3.049.059.033,00
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(2.901.663.244,00)		(3.049.059.033,00)
		-		-
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	-		-
	SURPLUS NON OPERASIONAL	-		-
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-		-
	Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	-		-
	Penjualan Aset Gedung	-		-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-		-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-		-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO	-		-
	Penghapusan Utang Beban	-		-
	Penghapusan Utang PFK	-		-
	Penghapusan Utang Transfer	-		-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-		-
	Penyisihan Piutang Terbayar/Dihapus	-		-
	Surplus Penyisihan Dana Bergulir	-		-
	Surplus atas aset yg direklas ke TGR	-		-
	Surplus atas Pembulatan sisa kas	-		-
	Surplus atas Penyusutan Aset Yang Dihilangkan	-		-
	DEFISIT NON OPERASIONAL	-		-
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-		-

	Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	-			-
	Penjualan Aset Gedung	-			-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-			-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-			-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-			-
	Penghapusan Aset Rusak Berat-Peralatan dan Mesin	-			-
	Penghapusan Aset Rusak Berat-Gedung Bangunan	-			-
	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan	-			-
	Penghapusan Aset Peralatan Mesin	-			-
	Penghapusan Aset Tak Berwujud	-			-
	Penghapusan Aset Yang Dihilangkan	-			-
	Defisit Dari Pembayaran Biaya Perencanaan	-			-
	Defisit dari Kerugian Investasi Permanen	-			-
	Penghapusan Piutang Pajak dan retribusi	-			-
	Penghapusan Piutang Retribusi	-			-
	Penghapusan Piutang Lainnya/TGR	-			-
	Penghapusan Aset yg di reklasifikasi ke Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	-			-
	Penyisihan Piutang Tak Terbayar	-			-
	Penyisihan Dana Bergulir	-			-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-			-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.901.663.244,00)			(3.049.059.033,00)
		-			-
	POS LUAR BIASA	-			-
	Pendapatan Luar Biasa	-			-
	Pendapatan Luar Biasa - LO	-			-
5.3.1.01.01	Beban Luar Biasa	-			-
5.3.1.01.01.0001	Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah	-			-
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-			-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(2.901.663.244,00)	-	-	(3.049.059.033,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NERACA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Uang Muka Pekerjaan	-	-
Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	816.718.993,00	816.816.993
JUMLAH ASET LANCAR	816.718.993,00	816.816.993,00
ASET TETAP		
Tanah	250.000.000,00	250.000.000
Peralatan dan Mesin	2.036.694.749,00	2.036.694.749
Gedung dan Bangunan	3.217.297.000,00	3.217.297.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.572.701.463,00)	(2.422.287.189)
JUMLAH ASET TETAP	2.931.290.286,00	3.081.704.560
PROPERTI INVESTASI	-	-
Properti Investasi Tanah		
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		

URAIAN	2023	2022
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	3.748.009.279,00	3.898.521.553,00
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	66.341.097,00	69.457.582
Utang Transfer	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66.341.097,00	69.457.582
JUMLAH KEWAJIBAN	66.341.097,00	69.457.582
EKUITAS		
EKUITAS	3.681.668.182,00	3.829.063.971
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.748.009.279,00	3.898.521.553,00

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. LOMBOK TENGAH**



LALU AHMAD SATRIADI, ST
 NIP-196511181996031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
N E R A C A R I N C I
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	PENYESUAIAN		2022
			DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	6
1	ASET				
2	ASET LANCAR				
3	Kas dan Setara Kas	-			-
4	Kas di Kas Daerah	-			-
5	Kas Bendahara Penerimaan	-			-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-		-
7	Kas di BLUD	-			
8	Setara Kas	-			-
9	Kas di bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
10	Kas di Bendahara BOS	-			-
11	Kas Lainnya	-			-
12	Piutang Pendapatan	-			-
13	Piutang Pajak	-			
14	Penyisihan Piutang Pajak	-			
15	Piutang Retribusi	-			
16	Penyisihan Piutang Retribusi	-			-
17	Piutang Hasil Pengeloan Kekayaan Daerah	-			-
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengeloan Kekayaan Daerah yang dinisahkan	-			-

19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-			
20	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-			
21	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	-			-
23					
24	Piutang Lainnya	-			-
25	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran	-			-
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran P	-			-
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan	-			-
28	Uang Muka Kerja	-			
29	Piutang Lain2 Lainnya	-			-
30	Piutang Pegawai	-			
31	Piutang Lain2 Lainnya	-			
32	Penyisihan Piutang Lain-lain lainnya	-			
33	Beban di bayar dimuka	-			-
34	Beban di bayar dimuka	-			
35	Persediaan	816.718.993,00			816.816.993,00
36	Persediaan Bahan Pakai Habis	492.000,00	492.000,00	590.000,00	590.000,00
37	Persediaan Bahan/Material	-			
38	Barang Kuasi	-			
39	Persediaan Barang lainnya	816.226.993,00			816.226.993,00
40					
41					
42	JUMLAH ASET LANCAR	816.718.993,00			816.816.993,00
43					

44	INVESTASI JANGKA PANJANG				
45	Investasi Non Permanen	-			-
46	Dana Bergulir	-			-
47	Dana Bergulir	-			
48	Penyisihan	-			
49	Investasi Permanen	-			-
50	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	-			-
51	Penyertaan Modal kepada BUMD /Perusahaar	-			
52					
53	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-			-
54					
55	ASET TETAP				
56	Tanah	250.000.000,00			250.000.000,00
57	Peralatan dan Mesin	2.036.694.749,00			2.036.694.749,00
58	<i>Akm peny peralatan dan mesin</i>	<i>(1.926.863.732,00)</i>		<i>100.493.800,00</i>	<i>(1.826.369.932,00)</i>
59	Gedung dan Bangunan	3.217.297.000,00			3.217.297.000,00
60	<i>Akm peny gedung dan bangunan</i>	<i>(645.837.731,00)</i>		<i>49.920.474,00</i>	<i>(595.917.257,00)</i>
61	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-			
62	<i>Akm peny jalan,irigasi dan jembatan</i>	-			
63	Aset Tetap Lainnya	-			
64	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			
65	JUMLAH ASET TETAP	2.931.290.286,00			3.081.704.560,00
66					
67	PROPERTI INVESTASI	-			-
68	Properti Investasi Tanah	-			

69	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-			
70	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			
71					
72	DANA CADANGAN	-			-
73	Dana Cadangan	-			-
74	JUMLAH DANA CADANGAN	-			-
75					
76	ASET LAINNYA				
77	Tagihan Jangka Panjang	-			-
78	Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
79	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Per	-			-
80	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-			-
81	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Benda	-			
82	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd PN Bu	-			
83	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Pihak	-			
84	Penyisihan TGR	-			
85	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-			-
86	Sewa	-			-
87	Tanah	-			
88	Gedung dan Bangunan	-			
89	Akumulasi Penyusutan	-			
90	Kerjasama Pemanfaatan	-			-
91	Tanah	-			
92	Gedung dan Bangunan	-			
93	Akumulasi Penyusutan	-			

94	Aset Tak Berwujud	-			-
95	Aset Tak Berwujud Lainnya	-			
96	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lain				-
97	Aset Lain-lain	-			-
98	Aset dalam proses TGR	-			
99	Aset Dalam Proses Penghapusan	-			-
100	Aset lain - lain rusak berat	-			
101	Detail Engineering Design (DED)	-			
102	Barang yang di serahkan kpd Masyarakat	-			
103	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-			
104	JUMLAH ASET LAINNYA	-			-
105					
106	RK - SKPD				
107					
108	TOTAL ASET	3.748.009.279,00			3.898.521.553,00
109					
110	KEWAJIBAN	-			-
111					
112	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
113	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-			-
114	Utang Iuran Jamkes	-			-
115	Utang Iuran Taspen	-			-
116	Utang PPh Pusat	-			
117	Utang PPN Pusat	-			
118	Utang PFK Lainnya	-			

119	Utang Bunga	-			-
120	Utang Bunga kepada pemerintah pusat	-			-
121	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
122	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
123	Pendapatan diterima dimuka	-			-
124	Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari p	-			
125	Utang Belanja	66.341.097,00	69.457.582,00	66.341.097,00	69.457.582,00
126	Utang Belanja Pegawai	63.634.016,00	65.584.012,00	63.634.016,00	65.584.012,00
127	Utang Belanja barang dan Jasa	2.707.081,00	3.873.570,00	2.707.081,00	3.873.570,00
128	Utang Belanja Modal	-			-
129	Utang Transfer	-			-
130	Utang Bantuan Keuangan ke Pemerintah De	-			
131	Utang Jangka Pendek Lainnya	-			-
132	Utang Jangka Pendek Lain - lain Lainnya	-			
133	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66.341.097,00			69.457.582,00
134					
135	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
136	Utang Luar Negeri	-			-
137	Utang kepada Pemerintah Pusat	-			-
138	Utang kpd Pem. Kabupaten/Kota Lain	-			-
139	Utang kepada BUMD	-			-
140	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bar	-			
141	Utang Dalam Negeri Lainnya	-			-
142	Utang Bunga	-			-
143	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			-

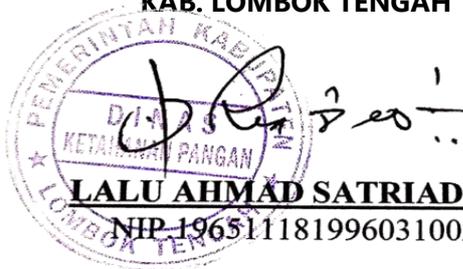
144					
145	TOTAL KEWAJIBAN	66.341.097,00			69.457.582,00
146					
147	EKUITAS				
153					
154	TOTAL EKUITAS	3.681.668.182,00			3.829.063.971,00
155					
156	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	3.748.009.279,00			3.898.521.553,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	3.829.063.971	3.961.719.761,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(3.049.059.033)	(7.030.097.020,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	-	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	-	-
R/K PPKD	2.901.663.244,00	6.897.441.230,00
EKUITAS AKHIR	3.681.668.182,00	3.829.063.971,00

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. LOMBOK TENGAH**


LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP. 196511181996031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	Uraian	2023	PENYESUAIAN		2022
			DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	6
1	EKUITAS AWAL*	3.829.063.971,00			3.961.719.761,00
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO**	(3.049.059.033,00)			(7.030.097.020,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-			-
	Koreksi Nilai Kas	-			-
	Kas di Kas Daerah	-			
	Kas di Bendahara Penerimaan	-			
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
	Kas di BLUD	-			
	Setara Kas	-			
	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
	Kas di Bendahara BOS	-			
	Koreksi Nilai Piutang	-			-
	Piutang Pajak	-			
	Penyisihan Piutang Pajak	-			
	Piutang Retribusi	-			
	Penyisihan Piutang Retribusi	-			
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekay Daerah	-			
	Piutang Lain2 PAD	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Piutang TGR	-			
	Penyisihan Piutang TGR	-			
	Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-			-
	Jasa dibayar dimuka	-			
	Barang dibayar dimuka	-			
	Koreksi Nilai Persediaan	-			-
	Persediaan Bahan Pakai Habis	-			
	Persediaan Bahan/ Material	-			
	Persediaan Barang Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Investasi	-			-
	Investasi Permanen	-			
	Investasi Nonpermanen	-			
	Penyisihan Investasi Non Permanen	-			
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-			-
	Tanah	-		-	
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			
	Aset Tetap Lainnya	-			-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-			-
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			
	Akumulasi Penyusutan	-			-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-			-
	Tagihan Jangka Panjang -TGR	-			
	Penyisihan TGR	-			
	Kemitraan dengan Pihak III	-			
	Aset Tidak Berwujud	-			

	Aset dalam proses penghapusan	-			
	Akumulasi Penyusutan	-			
	Aset Lain-lain	-			
	Koreksi Nilai Kewajiban	-			-
	Utang PFK	-			
	Utang Bunga	-			
	Bagian Utang Jangka Panjang	-			
	Pendapatan diterima dimuka	-			
	Utang Barang dan Jasa	-			
	Utang Belanja Pegawai	-			
	Utang Belanja Modal	-			
	Utang bansos	-			
	Utang Transfer	-			
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-			-
	Koreksi Nilai Aset Non APBD				-
	RK PPKD***	2.901.663.244,00		2.901.663.244,00	6.897.441.230,00
	EKUITAS AKHIR****	3.681.668.182,00			3.829.063.971,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :

- 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKPD) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.

- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang

signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga

mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang Negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

3) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Tapperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang

pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik didalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dan diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. Ekuitas dan lancar

Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadang

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

4) Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

5) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).*

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Target pendapatan asli daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki sumber retribusi. Pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi	-	-	-
3	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Perincian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah tidak memiliki sumber Pendapatan dari Pajak Daerah. Sehingga TA 2023 realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 0,00.

b) Retribusi Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah tidak memiliki sumber Pendapatan dari Retribusi Daerah. Sehingga TA 2023 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 0,00.

c) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00. Realisasi lain-lain PAD yang sah pada Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	-	-	-
2.	Pendapatan Jasa Giro	-	-	-
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
4.	Pendapatan atas Denda	-	-	-

	Keterlambatan Pekerjaan			
5.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	-	-	-
TOTAL		-	-	-

2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang DPA TA 2023 sebesar Rp.2.983.762.267,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp. 2.901.663.244,00 atau 97,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 82.099.023,00.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	2.983.762.267,00	2.901.663.244,00	97,25
2.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.983.762.267,00	2.901.663.244,00	97,25

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.901.663.244,00 atau 97,25% dari anggaran sebesar Rp.

2.983.762.267,00 Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	2.367.408.468,00	2.325.563.461,00	98,23
2.	Belanja Barang dan Jasa :			
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	86.774.870,00	81.458.000,00	93,87
	2) Barang jasa selain hibah	529.578.929,00	494.641.783,00	93,40
Jumlah		2.983.762.267,00	2.901.663.244,00	97,25

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.325.563.461,00,00dari target anggaran sebesar Rp. 2.367.408.468,00atau 98,23%dari target belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	JenisBelanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.532.810.534,00	1.507.254.247,00	98,33
2	Tambahan Penghasilan PNS	831.363.934,00	815.075.214,00	98,04
3	Biaya PemungutanPAD	-	-	-
4	Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-
5	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
6	Insentif atas Pemungutan PAD	-	-	-
7	Honorarium PNS	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00
8	Honorarium Non PNS	-	-	-
9	BelanjaBeasiswa Pendidikan. PNS	-	-	-
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS	-	-	-
Jumlah		2.367.408.468,00	2.325.563.461,00	98,23

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.616.353.799,00 dan sampai31 Desember 2023direalisasikan sebesar Rp. 576.099.783,00atau 93,47 % yang terdiri dari:

- a) BelanjaBarang/jasa yang akandiserahkankemasyarakat/pihak ketiga, terdiri dari:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Benih Sayuran	12.848.970,00	12.750.000,00	99,23
2	Pembuatan Plang Kelompok	5.159.160,00	5.154.000,00	99,90
3	Pengadaan Polybag dan Jaring Tanaman	11.620.950,00	11.400.000,00	98,10
4	Pengadaan Obat-Obatan	7.833.800,00	7.760.000,00	99,06
5	Paket Bantuan untuk Penanganan Kerawanan Pangan (Daerah Rentan Pangan)	49.311.990,00	44.394.000,00	90,03
Jumlah		86.774.870,00	81.458.000,00	93,87

b) Belanja barang/jasa selain barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat dirincisebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.427.040,00	1.420.000,00	99,51
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.685.500,00	67.503.950,00	89,19
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	211.425,00	210.000,00	99,33
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	24.687.811,00	22.660.600,00	91,79
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.697.944,00	4.661.500,00	99,22
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.616.230,00	5.840.500,00	88,28
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	692.340,00	685.500,00	99,01
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	332.150,00	329.500,00	99,20
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.816.240,00	1.800.000,00	99,11
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	25.844.095,00	22.675.000,00	87,74

12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.255.000,00	38.120.000,00	99,65
13	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000,00	600.000,00	100,00
15	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.000.000,00	8.950.600,00	99,45
17	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.200.000,00	104.200.000,00	100,00
18	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.000.000,00	24.907.200,00	99,63
19	Belanja Tagihan Air	5.908.750,00	4.164.905,00	70,49
20	Belanja Tagihan Listrik	17.872.360,00	17.872.360,00	100,00
21	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	100,00
22	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.976.000,00	7.706.740,00	85,86
23	Belanja Paket/Pengiriman	2.200.000,00	2.100.000,00	95,45
24	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.678.044,00	6.112.686,00	79,61
25	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerjaga bagi Non ASN	572.184,00	535.098,00	93,52
26	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	723.816,00	676.902,00	93,52
27	Belanja Sosialisasi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
29	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.652.000,00	56.858.742,00	81,63
30	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.030.000,00	41.150.000,00	93,46
Jumlah		529.578.929,00	494.641.783,00	93,40

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00.

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Tanah

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Tanah Pertanian	-	-	-
2	Pengadaan Tanah Prasarana Jalan Umum	-	-	-
Jumlah		-	-	-

2. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur Lainnya	-	-	-
3	Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	-	-	-
4	Pengadaan Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-
Jumlah		-	-	-

3. Gedung dan Bangunan

No.	JenisBelanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gedung	-	-	-
2.	Bangunan	-	-	-
Jumlah		-	-	-

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	JenisBelanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	-	-	-
2	Belanja Modal PengadaanKontruksiJembatan	-	-	-
3	Belanja Modal PengadaanKontruksiJaringan Air	-	-	-
4	Belanja Modal PengadaanInstalasiListrik dan Telepon	-	-	-
Jumlah		-	-	-

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	JenisBelanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal PengadaanHewan/Ternak dan Tanaman	-	-	-
2	Belanja modal pengadaan alat kontruksi/pertukangan	-	-	-
3	Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor	-	-	-
Jumlah		-	-	-

3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka defisitrealisasi anggaran adalah sebesar Rp. (2.901.663.244,00).

II.POS-POS NERACA

1. ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran*

Saldo Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo
1.	Sisa UP	0,00
2.	Sisa TUP	0,00
3.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	-
Jumlah		0,00

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan asal daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke kas Daerah.

No.	Uraian	Saldo
1.	Retribusi makan /minum/restoran	-
2.	Retribusi hotel	-
Jumlah		-

3) Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan jumlah tagihan Pajak yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan oleh wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Piutang Pajak Hotel	-	-
2.	Piutang Pajak Restoran	-	-

Jumlah	-	-
---------------	---	---

Saldopiutangpajakinimerupakan saldopiutang yang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan telah mempunyai ketetapan pajak atau yang setaradengansuratketetapan pajak.

4) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Retribusi restoran	-	-
2.	Retribusi hotel	-	-
Jumlah		-	-

5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TA 2023 merupakan akumulasi atas Penjualan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan diharapkan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	BLTPA- Rumah Dinas	-	-
2.	BLTPA- Kendaraan Roda 2	-	-
3.	BLTPA- Kendaraan Roda 4	-	-
Jumlah		-	-

6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo tuntutan ganti rugi atas hasil pemeriksaan beberapa instansi pemeriksa dan/atau pengawas dan tuntutan ganti rugi perorangan atas kelebihan

pembayaran tunjangan anak dan kelebihan pembayaran perjalanandinas yang terdiri dari:

No.	Uraian	SaldoTahun2023	SaldoTahun2022
1.	BPK RI	-	-
2.	BPKP	-	-
3.	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	-	-
4.	Inspektorat Provinsi NTB	-	-
5.	TGR Perorangan	-	-
Jumlah		-	-

7) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.816.718.993,00 dan Rp. 816.816.993,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2023	Saldo 2022
1.	Persediaan ATK, dll	492.000,00	590.000,00
2.	Persediaan Barang Kuasi	-	-
3.	Persediaan Alat Listrik	-	-
4.	Persediaan Obat-obatan	-	-
5.	Persediaan Alat Kesehatan	-	-
6.	Persediaan Obat Tanaman	-	-
7.	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
8.	Persediaan Bahan Makanan	-	-
9.	Persediaan Alat Kebersihan	-	-

10.	Barang/jasayang akan dihibahkan	816.226.993,00	816.226.993,00
Jumlah		816.718.993,00	816.816.993,00

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Merupakan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir maupun non bergulir kepada masyarakat.

c) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.931.290.286,00 dan Rp. 3.081.704.560,00. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.036.694.749,00	2.036.694.749,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.217.297.000,00	3.217.297.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.572.701.463,00)	(2.422.287.189,00)
Jumlah		2.931.290.286,00	3.081.704.560,00

Jumlah aset tetap pada Tahun 2023 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari keadaan tahun sebelumnya.

Aset tetap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,00 dan Rp. 250.000.000,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
	Jumlah	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00

2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.036.694.749,00 dan Rp. 2.036.694.749,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Alat-alat Angkutan	1.275.425.400,00	-	-	1.275.425.400,00
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.340.000,00	-	-	29.340.000,00
3.	Alat Pertanian	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
4.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.077.498.250,00	-	-	1.077.498.250,00
5.	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	110.373.000,00	-	-	110.373.000,00
	Jumlah	2.036.694.749,00	-	-	2.036.694.749,00

3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.217.297.000,00 dan Rp. 3.217.297.000,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Gedung	3.217.297.000,00	-	-	3.217.297.000,00
2.	Monumen / Situs	-	-	-	-
	Jumlah	3.217.297.000,00	-	-	3.217.297.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Nilai aset jalan, irigasi dan jembatan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Jalan	-	-	-	-
2.	Jembatan	-	-	-	-
3.	Jaringan Irigasi	-	-	-	-
4.	Jaringan Instalasi	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

5) Aset Tetap Lainnya.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Belanja Modal Hewan, Ternak Serta Tanaman	-	-	-	-
2.	Pengadaan peralatan	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun	Mutasi	Saldo
-----	------------	-------------	--------	-------

		2022	Tambah	Kurang	Tahun 2023
1.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

d) Aset Lainnya

Aset lain-lain/lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang secara fisik telah dikuasi oleh masyarakat, namun sampai dengan tanggal pelaporan aset tersebut belum dibuatkan naskah pernyataan hibah (NPH) dan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi dalam operasional aktif pemerintah.

No.	Jenis Aset	Penerima	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	AsetLainnya	-	-	-
2.	Penyusutan		-	-
	Jumlah		-	-

2. KEWAJIBAN

1) Uang Muka dari BUD

Saldo uang muka dari BUD sebesar Rp. 0,00, merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah. Timbulnya utang ini karena sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Bendahara Pengeluaran tidak menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah.

2) Utang Pajak Pusat

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan kepada Kas Negara atas pemungutan pajak. Utang Pajak Pusat ini terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Utang PPh 21	-	-
2.	Utang PPh 22	-	-
3.	Utang PPh 23	-	-

4.	Utang PPN	-	-
TOTAL		-	-

3) Pendapatan yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan daerah yang telah dipungut oleh Bendahara Penerimaan, namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pendapatan tersebut belum disetor ke Kas Daerah.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Utang jangka pendek kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

No.	Uraian	SaldoTahun2023	SaldoTahun2022
1.	Utang Beban (Listrik, Air, dan InternetbulanDesember2023)	2.707.081,00	3.873.570,00
2.	Utang BelanjaPegawai	63.634.016,00	65.584.012,00
TOTAL		68.291.093,00	69.457.582,00

3. EKUITAS/DANA

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2023dan per 31 Desember 2022masing-masing sebesar Rp.3.681.668.182,00dan Rp.3.829.063.971,00. Saldo Ekuitas Dana Lancar tersebut diatas jugamerupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat lancar, merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar/kewajiban jangka pendek.

C. PENUTUP

Demikian Catatan Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan.

Praya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah

